

## ABSTRAK

**Bety Darmiatiningtyas** Program Pascasarjana, Magister Ilmu Administrasi, Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2018 tentang Retribusi Aset Dinas PUPR Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk **dibimbing oleh Dr. Teguh Pramono, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Imam Fachruddin, M.Si sebagai pembimbing II.**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Retribusi tanah asset merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dengan mengacu kepada Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang retribusi aset. Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana implementasi retribusi aset berdasarkan teori Edward III. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi retribusi tanah asset serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian di dapat bahwa implementasi retribusi tanah asset belum memiliki standar operasional prosedur serta sumber daya manusia yang belum memadai. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan adalah faktor komunikasi yang sudah berjalan baik, dengan dilakukan sosialisasi. Sumber daya, kuantitas sarana dan prasarana kurang terawat dengan baik, serta rendahnya SDM secara kualitas. Disposisi sudah baik, karena dukungan pemerintah dan kepala desa setempat. Struktur birokrasi belum adanya SOP membuat implementasi retribusi ini belum berjalan dengan optimal.

*Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2018, Retribusi  
Aset*

## ABSTRACT

**Bety Darmiatiningtyas Postgraduate Program, Masters in Administrative Sciences, Research Title: Implementation of Regional Regulation Number 06 of 2018 concerning Retribution on Assets from the PUPR Service for Irrigation in Nganjuk District. Guided by Dr. Teguh Pramono, M.Si as supervisor I and Dr. Imam Fachruddin, M.Si as supervisor II**

Regional retribution are one of the important sources of regional income to finance the administration of regional governments to strengthen regional autonomy that is broad, real and responsible. Land retribution on assets are a source of local revenue from the levy sector with reference to Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning asset levies. This study describes how the implementation of asset retribution based on Edward III's theory. The purpose of this research is to find out how the implementation of land asset retribution and to find out the supporting and inhibiting factors of the policy. The research method used is descriptive qualitative.

Based on the research, it can be seen that the implementation of the levy on land assets does not yet have standard operating procedures and inadequate human resources. Supporting factors in implementation are communication factors that have been going well, with socialization carried out. Resources, quantity of facilities and infrastructure are not well maintained, and the quality of human resources is low. The disposition is good, because of the support from the government and the local village head. The bureaucratic structure of the absence of SOP makes the implementation of this retribution not run optimally.

*Keywords : Implementation, Regional Regulation Number 06 of 2018, Retribution for Asset*